

# **LAPORAN**



**HASIL PELAKSANAAN  
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**

**PERIODE APRIL-JUNI  
TAHUN 2024**

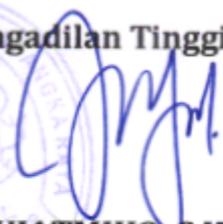
# **LEMBAR PENGESAHAN**

## **LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas  
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan  
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah**

**Disahkan di Palangka Raya  
Pada Hari Rabu, 3 Juli 2024**

**Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya**



**SUJATMIKO, S.H., M.H.  
NIP. 19600812 198612 1 001**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei ini merupakan kelanjutan implementasi perbaikan dari penilaian masyarakat pada survei periode sebelumnya, dan di dalam pelaksanaan survei dan laporan survei ini tentu masih perlu perbaikan- perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Palangka Raya, 3 Juli 2024

**Tim Survei**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Rencana Kerja .....	3
<b>BAB II</b> .....	5
<b>METODOLOGI</b> .....	5
2.1. Metode Penelitian .....	5
2.2. Populasi Dan Sampel .....	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control .....	6
2.5. Teknik Analisis Data .....	6
2.6. Tahapan pelaksanaan .....	7
<b>BAB III</b> .....	9
<b>INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI</b> .....	9
3.1. Profil responden .....	9
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator .....	14
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya .....	29
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya .....	30
<b>BAB IV</b> .....	32
<b>PENUTUP</b> .....	32
4.1. Kesimpulan .....	32
4.2. Rekomendasi .....	32

## DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Model Alur Penyusunan Survei SPAK Menuju Zona Integritas.....	7
2.	Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	8
3.	Nilai Persepsi.....	8
4.	Tingkat Pendidikan Responden .....	9
5.	Jenis Pekerjaan Responden .....	10
6.	Domisili Responden .....	12
7.	Usia Responden .....	13
8.	Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	15
9.	Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan.....	16
10.	Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh.....	17
11.	Indeks Pada Indikator Pada Transaksi Biaya.....	19
12.	Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan.....	20
13.	Indeks Pada Indikator Hadiah.....	21
14.	Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya.....	23
15.	Indeks Pada Indikator Percaloan.....	24
16.	Indeks Pada indikator Perbuatan Curang.....	25
17.	Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia.....	27
18.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada PT P. Raya.....	29
19.	Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada PT P. Raya.....	31
20.	Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satker PT. P.Raya.....	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menjadi menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas

penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

#### **1.4. Rencana Kerja**

##### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

##### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang

mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka atau secara online. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 31 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya). Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

#### **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan

yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

### **Model alur penyusunan survei SPAK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**  
**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**3.1. Profil responden**

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

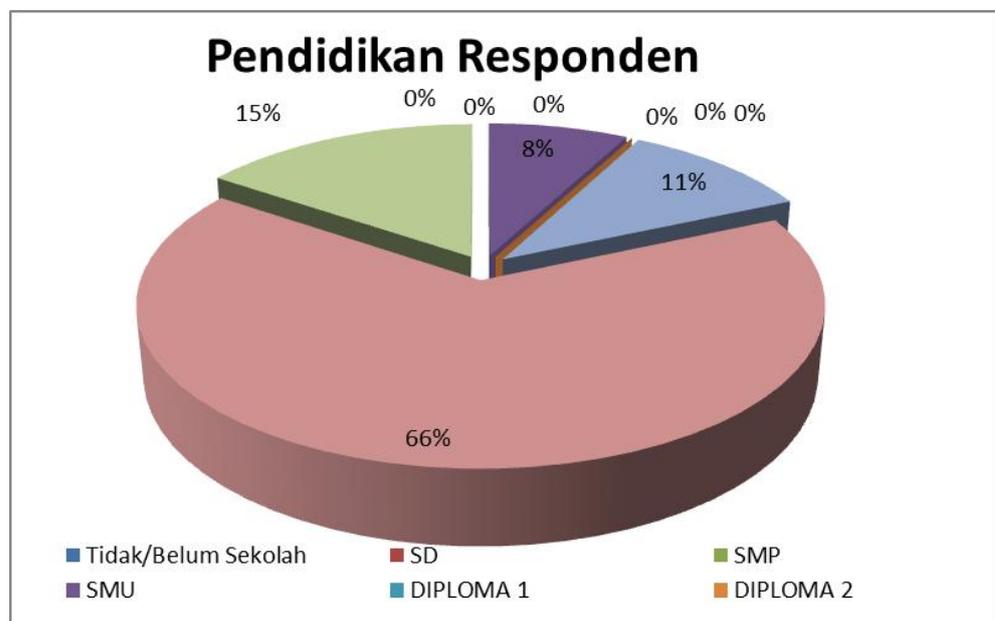
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya mayoritas dengan latar Pendidikan S1 yaitu sebanyak 68 responden atau 66% dari total 103 responden.

**Tabel 4.**  
**Tingkat pendidikan responden**

No	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak/Belum Sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SMP	0	0%
4	SMU	8	8%
5	DIPLOMA 1	0	0%
6	DIPLOMA 2	0	0%
7	DIPLOMA 3	11	11%
8	S1	68	66%

9	S2	16	16%
10	S3	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>103</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



**Jawaban Responden**

Gambar 3.1.1

### Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya Tingkat Pendidikan Terakhir

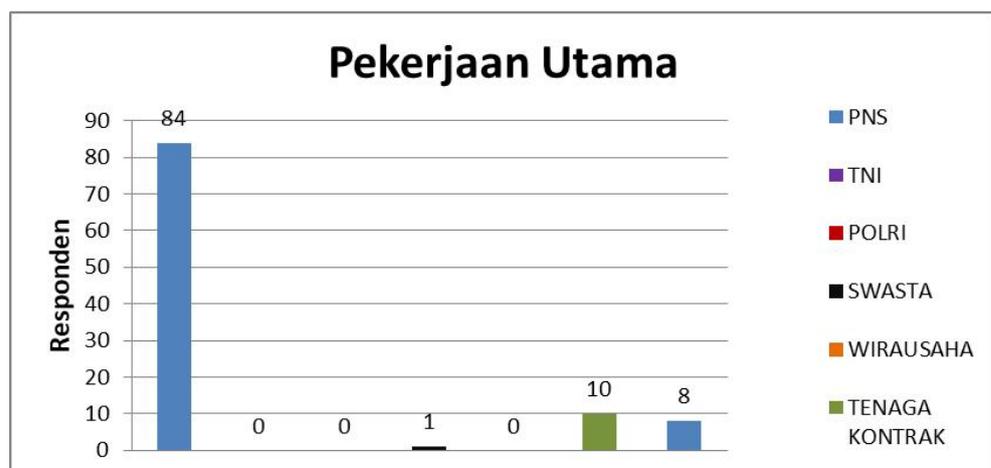
#### 3.1.2. Pekerjaan responden

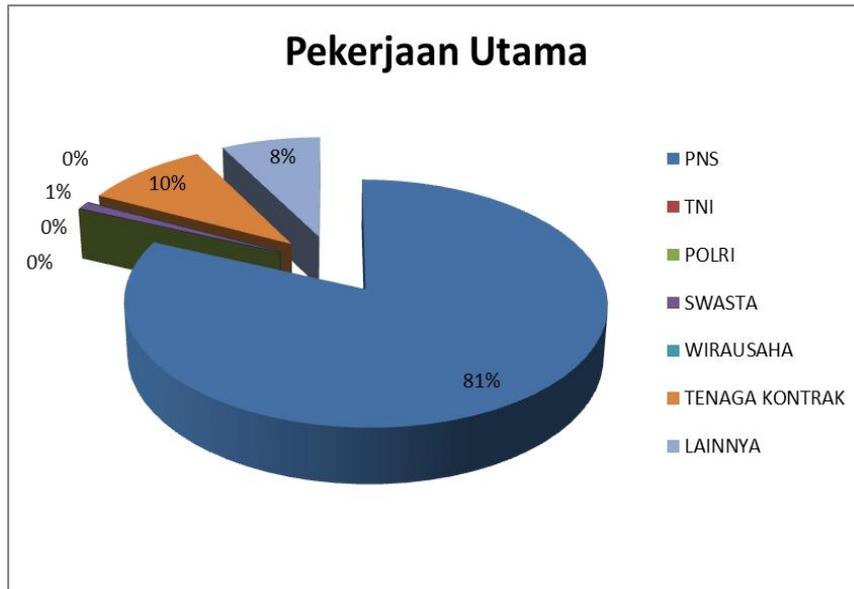
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 82% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya memiliki pekerjaan PNS yaitu sebanyak 84 (delapan puluh empat) responden.

**Tabel 5.**  
**Jenis pekerjaan responden**

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	84	82%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	0	0%
4	SWASTA	1	1%
5	WIRSAUSAHA	0	0%
6	TENAGA KONTRAK	10	10%
7	LAINNYA	8	8%
<b>Jumlah</b>		<b>103</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:





Gambar 3.1.2  
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya  
Tingkat Pekerjaan

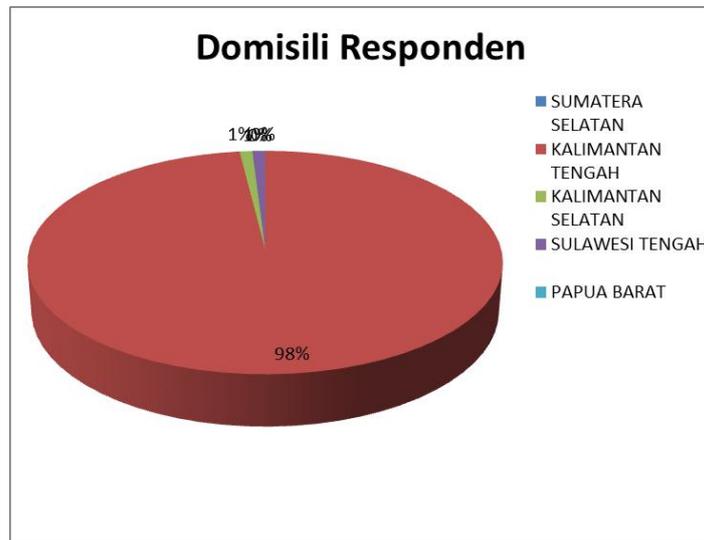
### 3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari Kalimantan Tengah yaitu sebanyak 101 (seratus satu) responden dengan prosentase 98%.

**Tabel 6**  
**Domisili Responden**

No	Domisili Responden	Frekuensi	Prosentase
1	SUMATERA SELATAN	0	0%
2	KALIMANTAN TENGAH	101	98%
3	KALIMANTAN SELATAN	1	1%
4	SULAWESI TENGAH	1	1%
5	PAPUA BARAT	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>103</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 3.1.3  
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya  
Domisili

#### 3.1.4. Kelompok usia responden

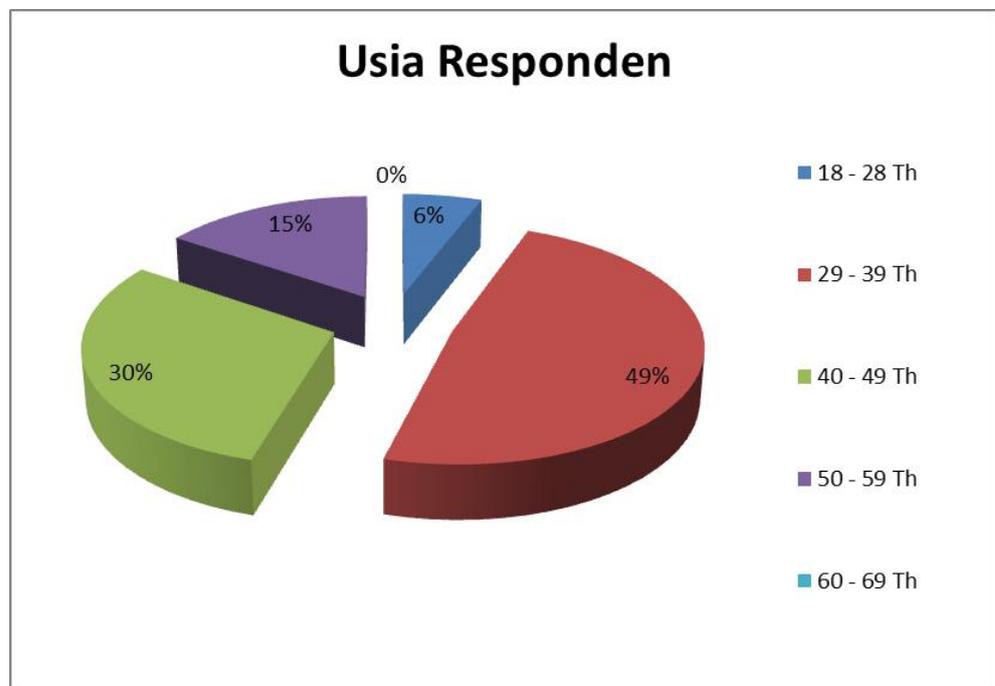
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu dengan jumlah yang sama pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun yakni sebanyak 50 (lima puluh) responden.

**Tabel 7.**  
**Usia responden**

No	Usia Responden	Frekuensi	Prosentase
1	18 - 28 Th	6	6%
2	29 - 39 Th	50	49%

3	40 - 49 Th	31	30%
4	50 - 59 Th	16	16%
5	60 - 69 Th	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>103</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.1.4  
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya  
Usia Responden

### 3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada interval indeks 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan

Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari Korupsi dan terlihat pada tabel 8.

**Tabel 8.**

**Indeks pada indikator manipulasi peraturan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0,00%	4,00
2	1.76-2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0,00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0,00%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	100	400	100,00%	
Jumlah			100	400	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



**Gambar 3.2.1**  
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya  
Indikator Manipulasi Peraturan

### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari Korupsi.

**Tabel 9.**

**Indeks pada penyalahgunaan jabatan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0,00%	4,00
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0,00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0,00%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	100	400	100,00%	
Jumlah			100	400	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.2  
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya  
Indikator Penyalahgunaan Jabatan

### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

**Tabel 10.**

**Indeks pada indikator menjual pengaruh**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0,00%	4,00
2	1.76-2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0,00%	

3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0,00%
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	100	400	100,00%
Jumlah			100	400	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.3  
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya  
Indikator Menjual Pengaruh

#### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

#### **Tabel 11.**

#### **Indeks pada indikator transaksi biaya**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	1	1	1,00%	3,94
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0,00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	3	9	3,00%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	96	384	96,00%	
Jumlah			100	394	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.4  
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya  
Indikator Transaksi Biaya

### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,88.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

**Tabel 12.**

**Tabel indeks pada indikator biaya tambahan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	4	4	4,00%	3,88
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0,00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0,00%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	96	384	96,00%	
Jumlah			100	388	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.5  
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya  
Indikator Biaya Tambahan

### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,89.

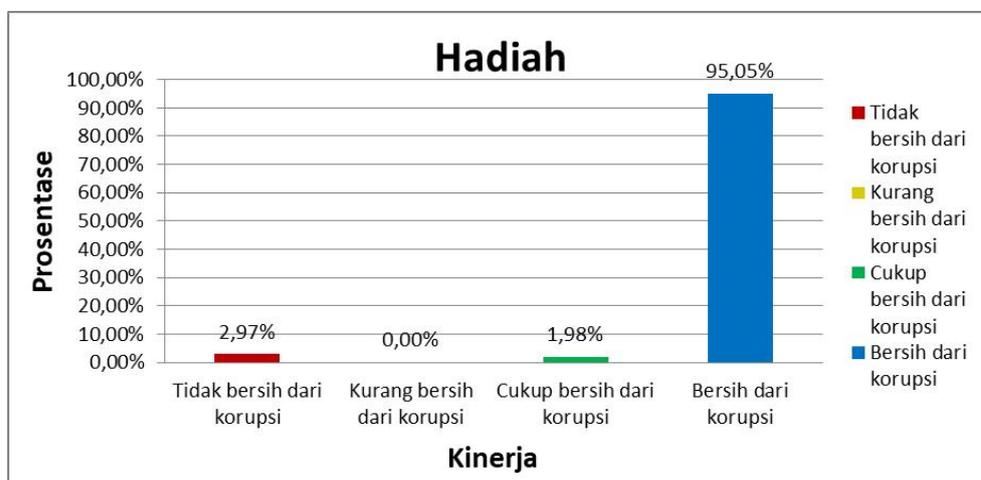
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

**Tabel 13.**  
**Indeks pada indikator hadiah**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	3	3	2,97%	3,89
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0,00%	

3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	2	6	1,98%
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	96	384	95,05%
Jumlah			101	393	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.6  
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya  
Indikator Hadiah

### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,89.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

**Tabel 14.**

**Indeks pada indikator transparansi biaya**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	3	3	3,00%	3,89
2	1.76-2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0,00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	2	6	2,00%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	95	380	95,00%	
Jumlah			100	389	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



**Gambar 3.2.7**  
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya  
Indikator Transparansi Biaya

### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,98.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

**Tabel 15.**  
**Indeks pada indikator percaloan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0,00%	3,98
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0,00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	2	6	2,00%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	98	392	98,00%	
Jumlah			100	398	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.8  
Survey Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya  
Indikator Percaloan

### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,99.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari tindakan perbuatan curang.

**Tabel 16.**  
**Indeks pada indikator perbuatan curang**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0,00%	3,99
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0,00%	

3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	1,00%
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	99	396	99,00%
Jumlah			100	399	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.9  
Survey Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya  
Indikator Perbuatan curang

### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

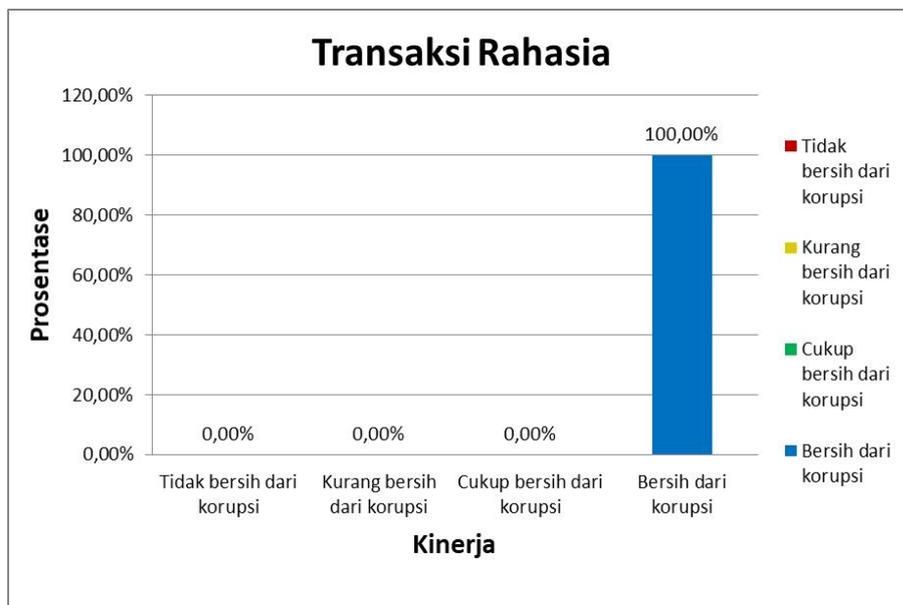
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bebas dari transaksi rahasia.

**Tabel 17.**  
**Indeks pada indikator transaksi rahasia**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0,00%	4,00
2	1.76-2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0,00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0,00%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	100	400	100,00%	
Jumlah			100	400	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



**Gambar 3.2.10**  
**Survey Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya**  
**Indikator Transaksi Rahasia**

### 3.3. Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebesar 3,96.

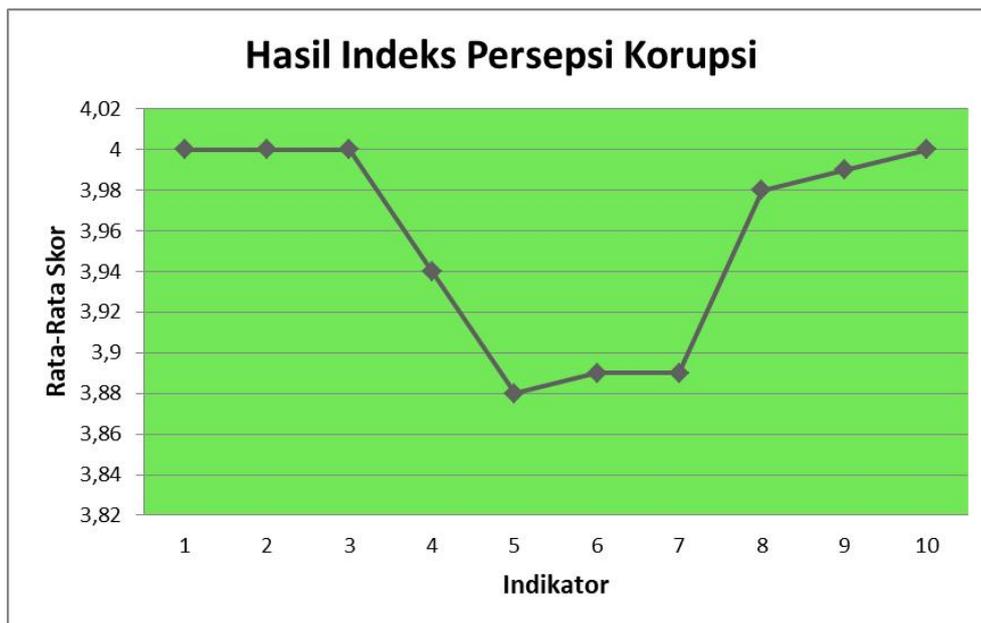
**Tabel 18.**  
**Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya**

No	Unsur Pertanyaan	NRR
Q 1	Manipulasi Peraturan	4
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4
Q 3	Menjual Pengaruh	4,00
Q 4	Transaksi Biaya	3,94
Q 5	Biaya Tambahan	3,88
Q 6	Hadiah	3,89
Q 7	Tranparansi Biaya	3,89
Q 8	Percaloan	3,98
Q 9	Perbuatan Curang	3,99
Q 10	Transaksi Rahasia	4
<b>JUMLAH</b>		<b>39,57</b>
<b>NILAI RATA-RATA IPK</b>		<b>3,96</b>

**Keterangan :**

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan  
**NRR** : **Nilai Rata-rata**  
 IPAK : Indeks Persepsi Anti Korupsi  
 : **Jumlah NRR IPAK**  
 \*) **Tertimbang**  
 NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi  
 Jumlah kuesioner yang terisi

<b>IPAK : 3.96</b>
--------------------



Gambar 3.3

Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00.

Tabel 19.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang

				bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

### **3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 20.**

#### **Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya**

<b>No</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya</b>
1	Pelayanannya cepat dan mudah
2	Pelayanan sangat baik, maju terus PT Palangkaraya.
3	Petugas melayani sesuai dengan prosedur

4	Pelayanan yang diberikan sudah sangat baik, mohon untuk dipertahankan
5	PT Palangkaraya sudah menerapkan layanan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,96** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,94.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,88.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,89.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,89.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,98.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,99.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00.

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Biaya Tambahan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yaitu 3,88.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Foto si SUPER Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

